

Pilar Demokrasi Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Tanggap Politik

Rifqiaqil Mufahir Erwansyah

Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Politeknik Manufaktur Bandung, Indonesia

Email: 222442020@mhs.polman-bandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pilar-pilar demokrasi, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan, dalam membentuk karakteristik masyarakat yang tanggap politik di tengah dinamika era digital. Demokrasi modern saat ini menghadapi tantangan krusial berupa apati politik dan rendahnya literasi di kalangan generasi muda yang seringkali rentan terhadap disinformasi dan keputusan politik transaksional. Masalah ini diatasi melalui pendekatan penyelesaian berupa revitalisasi peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pilar formal dan Pendidikan Politik (LitPol) sebagai pilar non-formal yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur interpretatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengungkapkan bahwa PKn berfungsi sebagai fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan pembentukan preferensi politik awal melalui pembelajaran interaktif. Di sisi lain, Pendidikan Politik memperkuat aspek kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat aktif dalam fungsi kontrol, evaluasi, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan akan modifikasi teori di mana PKn dan LitPol tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, melainkan harus bersinergi menjadi satu kesatuan pilar edukasi demokrasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara literasi kewarganegaraan dan kesadaran politik praktis merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga responsif dan kritis terhadap kebijakan negara.

Kata Kunci: Pilar Demokrasi, Masyarakat Tanggap Politik, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Literasi Politik, Kesadaran Politik.

Abstract

This study aims to analyze in depth the role of democratic pillars, particularly through the strengthening of the education sector, in shaping the characteristics of a politically responsive society amidst the dynamics of the digital era. Modern democracy currently faces a crucial challenge in the form of political apathy and low literacy among the younger generation, who are often vulnerable to disinformation and transactional political decisions. This issue is addressed through a solution approach in the form of revitalizing the role of Civic Education (PKn) as a formal pillar and Political Education (LitPol) as a sustainable non-formal pillar. Using a qualitative method through interpretive literature study and document analysis, this research reveals that PKn functions as the main foundation in instilling democratic values and forming early political preferences through interactive learning. On the other hand, Political Education strengthens the aspect of critical public awareness to be actively involved in the functions of control, evaluation, and participation in governance. The research results indicate a need for theoretical modification where PKn and LitPol cannot be separated dichotomously, but must synergize into a single unit of democratic education pillars. The research conclusion emphasizes that the synergy between civic literacy and practical political awareness is an absolute prerequisite for creating a society that is not only participatory but also responsive and critical towards state policies.

Keywords: Pillars of Democracy, Politically Responsive Society, Civic Education, Political Education, Political Literacy, Political Awareness



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, menjadikannya sebuah bangunan kokoh yang berdiri di atas pilar-pilar fundamental, seperti supremasi hukum, pers yang bebas, pemilihan umum yang adil, dan yang paling utama, adanya partisipasi dan

kesadaran dari warga negara (*Mufidah: 2020*). Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan dan kualitas demokrasi sangat bergantung pada seberapa jauh masyarakat dapat beradaptasi dan merespons setiap dinamika politik, yang secara kolektif diistilahkan sebagai Masyarakat yang Tanggap Politik. Masyarakat yang tanggap bukan hanya yang tahu cara memilih, tetapi yang mampu mengontrol, mengevaluasi, dan meningkatkan peran aktifnya dalam tata kelola pemerintahan (*Widiatmaka, dkk: 2025*).

Idealnya, mekanisme politik berjalan efektif jika masyarakat memiliki kapasitas untuk memahami isu, mengidentifikasi kepentingan, dan memberikan suara secara rasional (*Widiatmaka, dkk: 2025*). Namun, dalam realitasnya, terdapat jurang yang lebar antara harapan demokratis dengan kenyataan praktik politik di lapangan (*Mufidah: 2020*), (*Rahmaniah, dkk: 2024*). Masalah mendasar yang terus terjadi adalah munculnya fenomena apatis politik, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan penentu masa depan bangsa. Generasi ini, meskipun jumlahnya meningkat signifikan sebagai pemilih pemula, seringkali menunjukkan literasi politik yang rendah, sehingga rentan terhadap disinformasi dan keputusan politik yang emosional atau transaksional [4], (*Hamisa: 2018*). Sikap apatis ini diperparah dengan dinamika politik kontemporer, di mana informasi mengalir deras melalui media digital, membuat masyarakat kesulitan membedakan antara fakta dan propaganda, yang akhirnya menciptakan lingkungan politik yang toksik dan memecah belah. Masalah rendahnya partisipasi yang berkualitas ini menandakan bahwa pilar edukasi yang seharusnya menjadi benteng pertahanan demokrasi belum berfungsi secara optimal. Hal ini menjadi masalah yang mendesak, sebab tanpa adanya warga negara yang tanggap dan kritis, lembaga-lembaga demokrasi—seperti parlemen, partai politik, dan bahkan pers—akan kehilangan kontrol sosialnya yang esensial (*Hamisa: 2018*).

Menghadapi tantangan tersebut, pendekatan penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan memperkuat pilar edukasi politik secara terintegrasi dan holistik. Solusi yang diajukan berfokus pada revitalisasi peran ganda dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di jalur formal dan Pendidikan Politik (LitPol) di jalur non-formal. PKn harus dioptimalkan bukan hanya sebagai mata pelajaran normatif, tetapi sebagai wahana pendidikan demokrasi yang membentuk smart and good citizen. Sementara itu, LitPol harus menjadi proses pembelajaran berkelanjutan yang mendorong pengembangan bakat dan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi politik mereka sesuai dengan status dan misi hidup masing-masing individu [4]. Kajian teoritik yang relevan menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sektor terdepan dalam membangun karakter bangsa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. PKn memiliki peran penting untuk membentuk preferensi politik awal pemilih pemula, bahkan seringkali lebih dominan daripada preferensi orang tua dalam memberikan pemahaman awal terkait pandangan politik. Oleh karena itu, PKn harus diarahkan untuk membangun sikap demokratis siswa melalui interaksi guru yang interaktif dan penggunaan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, yang mendorong partisipasi siswa dalam organisasi. Secara empiris, pembelajaran PKn memang telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik mahasiswa (*Widiatmaka, dkk: 2025*), (*Prayuga: 2025*).

Lebih lanjut, teori Pendidikan Politik menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik agar terlibat aktif dalam proses politik. Pendidikan politik adalah sebuah proses belajar yang berkesinambungan dan wajib dipertahankan untuk membentuk kesadaran akan peran kemanusiaan dan peran kewarganegaraan. Melalui proses ini, masyarakat diajak mengambil peran aktif melalui partisipasi dalam proses berpikir, berdialog, dan bertindak politik demi mencapai kemajuan. Dengan memadukan landasan nilai dari PKn dan praktik kesadaran dari LitPol, dapat diwujudkan warga negara yang memiliki

sikap (disposisi), pengetahuan (literasi), dan keterampilan (partisipasi) politik yang memadai, membentuk Masyarakat yang Tanggap Politik yang diinginkan (*Mufidah: 2020*), (*Razali: 2025*).

Landasan Teori

1. Demokrasi dan Partisipasi Politik. Demokrasi secara esensial menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (*Mufidah: 2020*). Namun, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum, melainkan dari sejauh mana warga negara terlibat secara bermakna dalam proses politik (*Widiatmaka, dkk: 2025*). Partisipasi politik mencakup kegiatan sukarela warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi harus didasari oleh rasionalitas dan pengetahuan, bukan sekadar mobilisasi massa (*Widiatmaka, dkk: 2025*), (*Hamisa: 2018*).
2. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diidentifikasi sebagai leading sector dalam pembentukan karakter bangsa di jalur formal (*Rahmaniah, dkk: 2024*). Teori PKn menekankan pada tiga komponen utama kompetensi kewarganegaraan (civic competence): Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge): Pemahaman mendalam tentang sistem politik, hak, dan kewajiban. Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills): Kemampuan untuk berpartisipasi dan bernegosiasi dalam ruang publik. Sikap Kewarganegaraan (Civic Disposition): Karakter publik yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab. PKn bertujuan membentuk smart and good citizen yang mampu menjaga integrasi bangsa di tengah dinamika perubahan jaman.
3. Pendidikan Politik dan Kesadaran Politik. Pendidikan Politik didefinisikan sebagai proses belajar yang berkelanjutan untuk membentuk kesadaran politik dan peran kewarganegaraan. Berbeda dengan PKn yang bersifat formal-akademis, pendidikan politik mencakup proses yang lebih luas dalam masyarakat (*Hamisa: 2018*). Tujuannya adalah: Meningkatkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Mengembangkan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi politik sesuai misi hidupnya. Membentuk warga negara yang mampu melakukan dialog dan aksi politik demi kemajuan bersama.
4. Literasi Politik dan Pemilih Pemula. Literasi politik adalah kemampuan seseorang untuk memahami informasi politik dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang sadar (*Hamisa: 2018*). Bagi pemilih muda, literasi politik sangat krusial karena mereka berada pada fase pembentukan preferensi politik awal. Rendahnya literasi politik seringkali berujung pada apati atau perilaku politik yang tidak kritis (*Hamisa: 2018*). Oleh karena itu, penguatan pilar pendidikan menjadi instrumen utama untuk mengubah apati menjadi tanggap politik melalui sosialisasi dan simulasi yang interaktif.
5. Masyarakat yang Tanggap Politik (Konsep Sintesis). Masyarakat yang tanggap politik merupakan hasil dari integrasi antara civic literacy (pengetahuan) dan political awareness (kesadaran). Masyarakat dalam kategori ini tidak hanya memberikan suara saat pemilu, tetapi juga secara aktif mengevaluasi, merespons dinamika kebijakan, dan mampu memfilter informasi (literasi digital) agar terhindar dari disinformasi (*Widiatmaka, dkk: 2025*), (*Rahmaniah, dkk: 2024*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap, menginterpretasi, dan memahami secara mendalam peran dan mekanisme pilar-pilar demokrasi dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap politik, yang tidak dapat diukur secara statistik murni. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (kajian pustaka) interpretatif, yang mendasarkan pada berbagai media sebagai sumber literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang meliputi

pengumpulan, kategorisasi, dan analisis dokumen-dokumen terkait Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, partisipasi politik, dan demokrasi. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan langkah-langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diinterpretasikan dalam bentuk narasi mendalam, sebagaimana model analisis interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini dibagi berdasarkan dua fokus utama pilar edukasi demokrasi: peran formal (PKn) dalam membentuk sikap dasar, dan peran non-formal (Pendidikan Politik) dalam membentuk kesadaran dan partisipasi aktif, yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai Masyarakat yang Tanggap Politik.

Pembentukan Sikap Demokratis dan Kewarganegaraan Kritis

Temuan menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berfungsi sebagai wahana pendidikan demokrasi yang fundamental, dengan tujuan utama mewujudkan smart and good citizen. Proses ini dicapai melalui beberapa tahapan krusial.

1. PKn memberikan landasan nilai dan standar berperilaku sebagai warga negara, yang ditemukan memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan preferensi politik awal pemilih pemula, seringkali setara atau bahkan melampaui pengaruh preferensi orang tua.
2. PKn efektif dalam membangun sikap demokratis siswa melalui pembelajaran interaktif di kelas, seperti diskusi kelompok dan dukungan guru yang mendorong siswa untuk mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dalam organisasi. Keefektifan ini menunjukkan bagaimana temuan pendidikan formal secara langsung menjawab rumusan masalah mengenai rendahnya kualitas partisipasi, dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban.

Dengan demikian, PKn tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga menumbuhkan karakter bangsa yang relevan dengan tuntutan era digital, yaitu karakter yang mampu membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan.

Peningkatan Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan

Aspek kedua dari pilar edukasi adalah Pendidikan Politik, yang berperan sebagai proses belajar berkelanjutan. Temuan menginterpretasikan bahwa Pendidikan Politik memiliki urgensi tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik di kalangan pemilih muda, sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka secara terinformasi. Pendidikan Politik merupakan proses yang secara eksplisit bertujuan untuk membentuk kesadaran politik dan peran kewarganegaraan. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengontrol, mengevaluasi, dan meningkatkan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Jika dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, hasil ini menguatkan teori bahwa pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki korelasi positif terhadap partisipasi politik. Interpretasi kualitatif menunjukkan bahwa LitPol adalah jembatan yang mengaitkan teori demokrasi yang dipelajari di PKn dengan praktik politik nyata di lapangan.

Sinergi sebagai Pilar Tunggal menuju Masyarakat Tanggap Politik

Pembahasan ini memunculkan modifikasi teori bahwa PKn dan Pendidikan Politik harus dipandang sebagai satu kesatuan pilar edukasi yang saling menguatkan, bukan sebagai dua entitas terpisah. Masyarakat yang Tanggap Politik hanya dapat terwujud jika warga negara

memiliki fondasi nilai (dari PKn) yang kuat dan diperlengkapi dengan kesadaran praktis (dari LitPol) yang berkelanjutan. Ketika temuan PKn mampu membentuk civic disposition (sikap), dan LitPol memperkuat civic literacy (pengetahuan) dan civic skill (keterampilan), maka individu mampu mengambil peran aktif dalam berdialog dan bertindak politik secara rasional. Ini melampaui sekadar partisipasi pemilu; ini adalah kemampuan untuk merespons (tanggap) secara kritis terhadap kebijakan dan isu negara, sehingga pilar edukasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi.

KESIMPULAN

Penguatan pilar-pilar demokrasi dalam mewujudkan Masyarakat yang Tanggap Politik sangat bergantung pada optimalisasi fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Politik (LitPol) secara terintegrasi (*Mufidah: 2020*), (*Widiatmaka, dkk: 2025*). PKn berfungsi sebagai fondasi formal yang berhasil membentuk sikap demokratis dan landasan nilai kewarganegaraan kritis, khususnya pada pemilih pemula. Sementara itu, Pendidikan Politik berperan sebagai proses belajar non-formal yang esensial dalam membentuk kesadaran politik, meningkatkan literasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengontrol dan mengevaluasi pemerintahan. Sinergi kedua pilar ini menghasilkan warga negara yang tidak hanya tahu cara berpartisipasi, tetapi juga responsif, kritis, dan proaktif, yang merupakan ciri utama dari Masyarakat yang Tanggap Politik dan kunci vital untuk menjaga kualitas demokrasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual pilar pendidikan demokrasi melalui integrasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan pendidikan politik sebagai suatu ekosistem pembentukan masyarakat yang tanggap politik, bukan sebagai dua ranah edukasi yang bersifat dikotomis. Kajian terdahulu cenderung membahas pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pembentukan nilai dan identitas demokratis, sementara pendidikan politik lebih sering ditempatkan dalam konteks peningkatan kesadaran dan partisipasi politik; penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan memposisikan keduanya sebagai mekanisme yang saling melengkapi dalam membangun kesinambungan antara literasi kewarganegaraan, literasi politik, kesadaran kritis, dan partisipasi publik. Kebaruan utama terletak pada proposisi bahwa masyarakat yang tanggap politik tidak cukup dibentuk melalui peningkatan pengetahuan demokrasi, tetapi memerlukan integrasi antara kemampuan memahami institusi dan nilai demokratis, kemampuan mengevaluasi informasi serta kebijakan publik, dan kesiapan untuk melakukan kontrol sosial serta berpartisipasi secara bertanggung jawab. Dalam konteks era digital, kerangka ini juga memperluas konsep pendidikan demokrasi dengan memasukkan kemampuan menghadapi disinformasi, polarisasi, dan politik transaksional sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model integratif PKn–pendidikan politik yang menjembatani ranah pendidikan formal dan nonformal untuk menghasilkan warga negara yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga kritis, responsif, reflektif, dan mampu menjalankan fungsi kontrol demokratis terhadap tata kelola negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Prayugo dan R. B. Prayitno, "Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan," vol. 3, hlm. 427–442, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnaledukasia.org>
- Nastiti Mufidah, "Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Smart And Good Citizen," Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, vol. 1 Issue 2, hlm. 259–269, 2020.

- P. Widiatmaka, M. H. Nuryadi, dan A. Sugiyanto, "Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembelajaran dalam menumbuhkan karakter bangsa pada mahasiswa di era digital," *Humanika*, vol. 25, no. 1, hlm. 99–108, Mar 2025, doi: 10.21831/hum.v25i1.80367.
- Razali, Sri Erlinda, dan Jumili Arianto, "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa FKIP UNRI," 2025.
- S. E. Rahmaniah, D. Th. Musa, A. R. Alamri, M. Marini, dan D. Sari, "Penguatan Pendidikan dan Literasi Politik Dikalangan Muda," *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 9, no. 1, hlm. 133–143, Mar 2024, doi: 10.36312/linov.v9i1.1565.
- Wilda Hamisa dan Mukhamad Murdiono, "Peran Pkn Sebagai Pendidikan Politik Dalam Membangun Sikap Demokratis Dan Partisipasi Siswa Dalam Organisasi Di SMA," no. pendidikan politik, Sep 2018.